

**GUGATAN GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN NAMA  
BAIK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Oleh

**SUHERMAN BAHRAN**

NIM. 10500110103

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2015**

**GUGATAN GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK DI  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

**SUHERMAN BAHRAN**

**NIM. 10500110103**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHERMAN BAHRAN  
NIM : 10500110103  
Tempat/Tgl Lahir : PINRANG/ 01 FEBRUARI 1991  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ IH  
Angkatan : 2010  
Alamat : Jl. Toddopuli X

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul *GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR* adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Samata-Gowa, 2 Desember

2014

Penyusun,

SUHERMAN BAHRAN  
NIM: 10500110103

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Gugatan Ganti Rugi Atas Pencemaran Nama Baik Di Pengailan Negeri Makassar*” yang disusun oleh saudara Suherman Bahran, Nim: 10500110103, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Selasa tanggal 02 Desember 2014 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, dengan beberapa perbaikan.

Samata-Gowa, 26 Maret 2015 M  
05 Jumadil Akhir 1436 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dra. Sohrah, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)
Munaqisy II	: Istqamah, SH,MH.	(.....)
Pembimbing I	: Erlina, SH,MH.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muhammad Sabir, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Alauddin Makassar

\*Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.  
NIP. 195704141986031003

## KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang pantas yang diucapkan oleh lidah yang tak bertulang ini melainkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya menyebabkan karya tulis yang sangat sederhana ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Salawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam kebodohan menuju alam keilmuan sampai sekarang ini.

Dengan kesempatan yang tersedia dan penuh suka duka selama di Perguruan Tinggi, maka penulis berusaha memenuhi syarat akademis melalui tulisan ini sebagai tanda berakhirnya studi formal di Fakultas Hukum pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atas selesainya skripsi ini, maka terbukalah kesempatan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, terutama kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Hamsir, SH.M.Hum, Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Ibu Istiqamah, SH.,MH., serta staf jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan

pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan karya ilmiah ini.

3. Ibu Erlina,SH,MH., selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi Ilmu terkait judul yang diangkat penyusun dan Bapak DR. Muhammad Sabir,, M.Ag sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait judul yang diangkat penyusun.
4. Kedua orang tua yang saya cintai dan hormati Bapak Bahrhan Malebbang, dan Ibu Haswati yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya sejak lahir hingga dewasa ini, mengajarkan arti hidup, memberikan segalanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan saya sejak kecil hingga saat ini, semua jasa orang tua yang telah membiayai pendidikan saya dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang dengan penuh perhatian mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semua jasa-jasanya yang tidak akan mampu saya tuliskan dalam kata pengantar ini, karena begitu banyak pengorbanan yang dilakukan kedua orang tua saya. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kesehatan dan membalas semua yang kalian berikan kepada saya.
5. Kepada saudari perempuan saya Mega dan saudara laki-laki saya Sudarsono yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian studi strata satu. Beserta sepupu-sepupu saya yang senantiasa membantu dalam proses penyelesaian studi.
6. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2010 khususnya Ilmu Hukum terima kasih atas kebersamaan kalian semua selama kurang lebih 4

(empat) tahun yang telah banyak memberikan masukan dan arti kebersamaan kepada saya.

7. Teman-teman seperjuangan serta Para Pelatih Delegasi UIN Alauddin Makassar pada Nasional Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana II Universitas Udayana Bali 2012 yang telah memberikan banyak motivasi kepada saya selama penyusun skripsi ini.
8. Teman-teman pengurus maupun anggota Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan masukan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Yang ke 10 atau yang terakhir saya ucapkan banyak terimah kasih kepada seorang wanita (Nurhikma) yang senantiasa ada disaat saya membutuhkan bantuan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini .

Di dalam tulisan ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan , maka diharapkan dari para pembaca memberi masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Sebelum dan sesudahnya diucapkan banyak terimakasih.Semoga amal ibadah-Nya serta bantuan yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT, Amien.

Makassar, 2014

Penulis

## A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathahdanya</i>	ai	adan i
اَوْ	<i>Fathahdanwau</i>	au	adan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	I dan garis di atas
اُ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	u	U dan garis di atas

Contoh: مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. Ta' marbutah

*Transliterasi* untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعِمَ : *nu‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh: عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَأْمُرُونَ : *ta‘muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *بِالله billah* *دِينُ الله dinullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: *هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital

berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma Muhammadun illa rasul*  
*Inna awwal baitin wudi 'alinnasilallazi* *bi*  
*Bakkatamubarakan*  
*Syahrul Ramadan al-lazi unzilafih al-Qur'a>n*  
Nasir al-Din al-Tusi  
Abu Nasr al-Farabi  
Al-Gazali  
Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

KUHP	= Kita Undang-Undang Hukum Pidana
UUD	= Undang-Undang Dasar
ITE	= Informasi dan Teknologi Elektronik
HAM	= Hak Asasi Manusia
swt.	= <i>subhanahuwata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
HR	= Hadis Riwayat
Q.S. ...(...): 4	= Quran, Surah ..., ayat 4

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= الى اخرها / الى اخره
ج	

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR. ....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI. ....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
1. Gugatan .....	9
a. Pengertian Gugatan.....	9
b. Ciri-ciri Gugatan.....	10
c. Bentuk Gugatan.....	10
2. Pencemaran Nama Baik.....	12
a. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	12
b. Bentuk Pencemaran Nama Baik .....	14
c. Tujuan dan Kegunaan .....	15
 <b>BAB II     TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Gugatan Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum. 17	
1. Pengertian Gugatan Ganti Rugi Dan Cara Mengajukan Gugatan.....	17
a. Gugatan .....	17
b. Pengertian Ganti Rugi .....	25
c. Perbuatan Melanggar Hukum Dan Unsur-Unsurnya ...	26

B.	Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	31
1.	Pengertian Nama Baik.....	31
2.	Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	31
3.	Jenis Pencemaran Nama Baik .....	32
4.	Bentuk Kerugian Pencemaran Nama Baik.....	34
5.	Benetuk Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik .....	35
C.	Kerangka Konseptual .....	37

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A.	Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B.	Pendekatan Penelitian .....	38
C.	Sumber Data .....	38
D.	Metode Pengumpulan Data.....	39
E.	Instrumen Penelitian .....	39
F.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Atas Pencemaran Nama Baik Akibat Melanggar Hukum .....	42
B.	Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Nama Baik.....	60

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran .....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## ABSTRAK

**Nama** : Suherman Bahran  
**NIM** : 10500110103  
**Jurusan** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Judul** : GUGATAN GANTI RUGI ATAS  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

---

Skripsi ini membahas masalah gugatan ganti rugi atas pencemaran nama baik di pengadilan negeri makassar. Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui proses penyelesaian ganti rugi dan faktor apa saja yang menghambat proses gugatan ganti rugi terhadap pencemaran nama baik.

Metode yang digunakan dalam penyusunan ini pengumpulan data melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Pustaka (*Library Research*) yakni mempelajari Undang-Undang maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan gugatan ganti rugi terhadap pencemaran nama baik. Disamping itu penulis juga mengumpulkan literatur dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan gugatan ganti rugi atas pencemaran nama baik. Sementara Penelitian Lapangan dilakukan dengan wawancara narasumber terkait yakni Hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penyelesaian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik terkadang ditolak dikarenakan tidak adanya putusan pidana yang dimasukkan dalam gugatan yang di mana putusan pidana tersebut tercantum telah terjadinya tindak pidana penghinaan yang mempunyai kekuatan hukum.

Dari beberapa putusan tersebut kita dapat mengetahui langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan gugatan atas pencemaran nama baik dan apa-apa yang dipersiapkan dalam gugatan tersebut.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi dan penegakan supremasi hukum. Hal ini sangat penting karena melalui supremasi hukum akan memberikan kepastian hukum, di mana individu sebagai subjek hukum akan merasa terlindungi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah masyarakat. Kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai sistem negara demokrasi.<sup>1</sup>

Perkembangan dalam negara demokrasi memberikan tempat yang sama mengenai hak dan kewajiban terhadap warganya, sehingga tercipta adanya kebebasan yang bertanggung jawab yang dilindungi oleh undang-undang. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat sejak lahir hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia manusia, hak tersebut berlaku bagi setiap manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, suku, jenis kelamin dan kepercayaan<sup>2</sup>

Sebagai akibat adanya perlindungan hak setiap individu, yaitu ketika seseorang merasa dirinya terjadi pelanggaran hak berupa pencemaran nama baik, maka pihak yang bersangkutan dapat dan berhak mengajukan tuntutan hak pada

---

<sup>1</sup>S. Sumarsono. Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Akademik Persido 2004), h.10.

<sup>2</sup>Sudirman, *Hak-Hak Asai Manusia Dan Media (Human Right And The Media,)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h 13.

pengadilan berupa tuntutan ganti rugi. Oleh karena pencemaran nama baik merupakan salah satu ruang lingkup dari hak asasi manusia<sup>3</sup>. Hak untuk menuntut tuntutan ganti rugi ditentukan dalam hukum perdata, sedangkan bagaimana cara mengajukan tuntutan ditentukan dalam hukum acara perdata yang di mana dalam hukum acara perdata memuat mengenai cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil<sup>4</sup>. Oleh sebab itu, maka hukum perdata lah yang mengatur dan menentukan agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat mengetahui dan menghormati hak dan kewajiban orang yang satu dengan yang lain, sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan baik.

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum harus berjalan dengan baik sesuai aturan dan tatanan hukum positif. Hak-haknya tidak diperoleh tanpa didahului dengan pemenuhan kewajiban manusia itu sendiri. Oleh sebab itu dalam hubungan sosial kemasyarakatan, seorang manusia harus mampu mengendalikan diri agar tidak terjadi benturan dalam menggunakan hak-haknya tanpa merugikan orang lain. Sering terjadi di dalam masyarakat hanya karena dirinya yang kebetulan pejabat merasa dirinya atau nama baiknya tercemar, begitu pula seseorang tidak terbukti menghina atau memfitnah masih menganggap nama baiknya dicemarkan. Hal ini tentunya berkenaan dengan harkat dan martabat

---

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, M.A, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Erlangga 2005), h 91.

<sup>4</sup>Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Hukum Dan Praktek* (Jakarta: Bina Cipta, 2000) h 121.

seseorang, dimana antara seseorang dengan warga lainnya harus saling hormat menghormati, harga menghargai dan saling mengasihi.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, di mana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>5</sup> Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seseorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.<sup>6</sup>

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu

---

<sup>5</sup>Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publikdictum*, (Semarang: PT Karya Bangsa, 2004,) h 17.

<sup>6</sup>Wiryono prodjodoikoro, *Delik Penghinaan* (Bandung: PT Adijaya, 2008), h 98

masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>7</sup>

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>8</sup>

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).<sup>9</sup> Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “... pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,...”.<sup>10</sup>

Dalam Agama Islam juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dibuktikan dengan bagaimana kaum muslimin diwajibkan saling menghormati sesama muslim dan mau pun dengan non muslim.

---

<sup>7</sup>Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalpemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum*, (Semarang: PT Karya Bangsa, 2004), h 18.

<sup>8</sup>Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalpemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum*, h 18.

<sup>9</sup>Oemar Seno Aji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* ( Jakarta: Erlangga, 1990) h 36

<sup>10</sup>Oemar Seno Aji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, h 36.

Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt<sup>11</sup>. Dalam hukum Islam dijumpai dengan istilah jinayah, yaitu suatu perbuatan dilarang oleh syara, karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal<sup>12</sup>. Didalam ajaran Islam pencemaran nama baik sama halnya dengan mengunjing seseorang atau ghibah sementara ghibah identik dengan kata fitnah, sebagai mana dalam hadits Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ». قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا نَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ

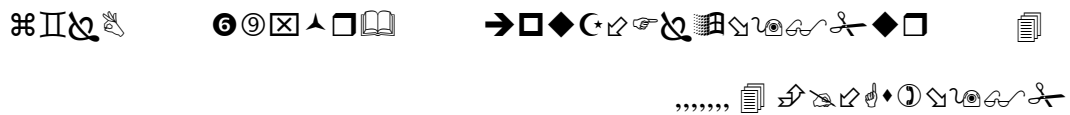
Terjemahannya :

*Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bertanya, "Tahukah kamu, apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya (menggunjingnya). Namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah menfitnahnya (menuduh tanpa bukti)." (HR. Muslim no. 2589, Bab Diharamkannya Ghibah)*

Fitnah adalah tuduhan yang tidak dilandasi bukti yang benar kepada seseorang atau kelompok tertentu dengan maksud menjelekkan orang (seperti, menodai nama baik, dan merugikan kehormatan orang)". Perbuatan fitnah sangat dibenci oleh Allah swt sebagaimana dalam Firmannya

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafik, 2007) h 60.

<sup>12</sup>Mahkrus Munajat, *Dekonstruksi Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung, Pustaka, 2004 ), h



Terjemahannya :

*“ dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan “. (QS. Al-Baqoroh : 191)*

Dan didalam surah An-Nisa ayat 148 Allah telah mengisyaratkan bahwa dia tidak menyukai hamba yang melakukan pencemaran nama baik terhadap sesama manusia.



Terjemahannya :

*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dalam islam ketika terjadi penuduan maka diwajibkan untuk menghadirkan bukti berupa saksi untuk membenarkan bahwa peristiwa tersebut benar telah terjadi sehingga tidak menimbulkan fitnah. Sebagai mana dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

Oleh karena itu, begitu penting dan tingginya harkat dan martabat serta harga diri manusia sebagai Makhluk Tuhan dibanding makhluk lainnya, sehingga hukum memberi jaminan perlindungan manakala hak-haknya dilanggar atau nama baiknya dicemarkan.

Akan tetapi pada zaman ini telah banyak manusia yang telah jauh dari koridor-koridor hukum baik hukum agama maupun hukum positif mereka banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang terkadang melanggar hak-hak orang lain dalam hal ini yaitu melakukan pencemaran nama baik seseorang yang mengakibatkan timbulnya kerugian baik secara materil maupun in materil. Dengan adanya kerugian tersebut maka seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri agar hak-haknya dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji dan meneliti serta memaparkan hasil penelitian ini dalam suatu karya ilmiah dengan judul "GUGATAN GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK".

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka untuk menghindari terjadinya pembahasan pokok kajian yang menyimpang dari objek penulisan maka penulis terlebih dahulu menetapkan batasan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana penyelesaian gugatan ganti rugi atas pencemaran nama baik pada Pengadilan Negeri Makassar ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penyelesaian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya mengenai putusan gugatan ganti rugi terhadap pencemaran nama baik dalam acara perdata. Untuk menghindari akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan maka penulis akan memberikan pengertian satu persatu dari kata tersebut antara lain.

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap subjek hukum yang diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum.<sup>13</sup>

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dan menyiarkan agar supaya diketahui umum, baik secara lisan maupun tulisan.<sup>14</sup>

### **D. Kajian Pustaka**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis akan memberikan kajian pustaka agar tidak lepas dari kontes judul dari penulisan.

#### **1. GUGATAN**

##### **A. Pengertian Gugatan**

---

<sup>13</sup>M. Marwan, *Kamus Hukum* (t,d) , h 227

<sup>14</sup>M. Marwan, *Kamus Hukum* (t,d) , h 449

1. Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
2. Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).
3. Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

#### B. Ciri-Ciri Gugatan

1. Perselisihan hukum yg diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.
2. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 pihak.
3. Bersifat partai (party) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

#### C. Bentuk Gugatan

Gugatan diajukan dapat berbentuk :

1. Tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg).

## 2. Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg).

Tentang gugatan lisan “bila mana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan”.(Pasal 120 HIR). Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan

Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan :

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975 dll).
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

Apabila tidak memenuhi syarat di atas, maka gugatan menjadi tidak sempurna dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketidak sempurnaan dapat dihindarkan, jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu ke ketua pengadilan. Namun

karena sekarang sudah banyak advokat/pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulis baca.

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak.

1. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.
2. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materiil (pembuktian).

## 2. PENCEMARAN NAMA BAIK

### A. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah

kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Berikut beberapa pengertian pencemaran nama baik yang dikemukakan oleh kalangan doktrina, diantaranya:

**R Soesilo** “ Kejahatan atas nama baik atau perbuatan menghina adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang .yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan disini hanyalah dalam lapangan nama baik tidak dalam lapangan seksual. Perbuatan yng menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidaklah termasuk dalam kategori penghinaan atau kejahatan atas nama baik”<sup>15</sup>.

**Wirjono Prodjodikoro** ”Kejahatan atas nama baik adalah suatu kejahatan dengan mana kejahatan itu ditujukan mengenai kehormatan”<sup>16</sup>.

**Moch Anwar** “Kejahatan atas nama baik adalah suatu kejahatan dengan mana seseorang melakukan kejahatan terhadap nama baik. Moch Anwar mengartikan kehormatan sebagai suatu perasaan pribadi terhadap harga diri. Sedangkan pengertian nama baik oleh moch anwar diartikan sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat (kehormatan luar) yang mana biasanya ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi”<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Http : // Mydailystudy .Wordpress .Com *Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik* /2011/07/02/12/

<sup>16</sup>Http : // Mydailystudy .Wordpress .Com *Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik* /2011/07/02/12/

<sup>17</sup>Http : // Mydailystudy .Wordpress .Com, *Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik* / 2011/07/02/12/

Menurut Ledeng Marpaung, istilah penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuannya melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang<sup>18</sup>.

Perbuatan penghinaan pada dasarnya merupakan tindakan atau sikap yang sengaja melanggar nama baik atau menyerang kehormatan seseorang (*belediging is op te vatten als : het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam*). Perbuatan penghinaan bisa dilihat dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Pengertian penghinaan yang bisa dijadikan alas untuk mengajukan gugatan perdata adalah sama dengan pengertian penghinaan dalam hukum pidana. Jadi pelaku penghinaan bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata sekaligus

#### B. Bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :

##### a. Penghinaan materiil

---

<sup>18</sup>Jusri [Http://Www.Negarahukum.Com/Hukum/Delik-Penghinaan.Html](http://Www.Negarahukum.Com/Hukum/Delik-Penghinaan.Html) (November 19, 2011)

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan pengkajian dan pembahasan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik.
2. Guna mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pencemaran nama baik.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dari segi teorinya, penelitian dan penulisan ini dapat memberikan masukan konstruktif kepada masyarakat pada umumnya dan kalangan

perguruan tinggi pada khususnya dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama menyangkut tuntutan ganti kerugian atas pencemaran nama baik tersebut.

- b) Dari segi praktisnya, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah In Casu Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk pelaksanaan ganti kerugian atas pencemaran nama baik seseorang.





## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Gugatan Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum

##### 1. Pengertian Gugatan dan Cara Mengajukan Gugatan

###### a. Gugatan

Gugatan dalam hukum perdata terdiri dari gugatan permohonan (*voluntair*) dan gugatan kontentiosa. Gugatan permohonan menurut Mahkamah Agung adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri<sup>19</sup>. Ciri-ciri dari suatu permohonan sebagai berikut<sup>20</sup>:

- 1). Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).
- 2). Permohonan tidak menyangkut sengketa dengan pihak lain;
- 3). Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*exparte*).

Sedangkan gugatan kontentiosa adalah gugatan perdata yang mengandung permasalahan dengan orang lain yang mengandung sengketa atau perselisihan di

---

<sup>19</sup> Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta :Bina Cipta,2000), h, 56.

<sup>20</sup> Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, h, 56.

antara para pihak (*between contending parties*) yang diajukan kepada ketua pengadilan untuk diperiksa dan diputus<sup>21</sup>.

Gugatan kontentiosa kita temukan, *pertama* di Pasal 118 ayat (1), 119 dan 120 HIR dengan menyebut istilah "Gugatan Perdata dan Gugatan"; *kedua* di Pasal 1 RV menyebut gugatan kontentiosa dengan istilah "Gugatan" yang berbunyi "*tiap-tiap proses perkara perdata.....dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan....*". Menurut. Sudikno Mertokusumo, gugatan kontentiosa adalah tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain<sup>22</sup>. Mahkamah Agung menyebut gugatan kontentiosa dalam putusannya yang berbunyi "selama proses perkara belum diperiksa di persidangan, penggugat berhak mencabut gugatan dengan persetujuan tergugat".

Perbedaan antara contentiosa dan voluntaria dapat kita ketahui lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pihak yang berperkara :
  - a. Contentiosa, pihak yang berperkara adalah penggugat dan tergugat. Ada juga istilah turut tergugat (tergugat II, II, IV , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu. Namun hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam

---

<sup>21</sup> Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, h, 59

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* ( Yogyakarta: Liberty, 1977), h 98.

berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR maupun praktek.

- b.** Voluntaria, pihak yang berperkara adalah pemohon. Istilah pihak pemohon dalam perkara voluntaria di atas, ini tentunya tidak relevan dengan jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik. Istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria.

## 2. Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara :

- a.** Contentiosa, terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak
- b.** Voluntaria : hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif.

## 3. Kebebasan hakim

- a.** Contentiosa : hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang
- b.** Voluntaria : hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.

#### 4. Kekuatan mengikat putusan hakim

- a. Contentiosa : hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.
- b. Voluntaria : mengikat terhadap semua pihak.

#### 5. Hasil akhir perkara :

- a. Hasil suatu gugatan (Contentiosa) adalah berupa putusan (vonis)
  - b. Hasil suatu permohonan (voluntaria) adalah penetapan (beschikking).
- b. Cara Mengajukan Gugatan**

Gugatan disebut sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa atau disebut sebagai tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) yang terdapat dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 RBg). Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1, 142 ayat 1 RBg) maupun secara lisan (pasal 120 HIR, 144 ayat 1 RBg). Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Di sini Hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa di antara pihak-pihak yang benar dan siapa yang tidak benar.

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah minta penyelesaian melalui pengadilan. Untuk itu penggugat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Dalam HIR dan RBg hanya

mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedang tentang mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya.

Dalam mengajukan gugatan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam surat gugatan yang harus termuat pokok-pokoknya<sup>23</sup>:

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara (*identity of the parties*), yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama.
2. Dasar gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum (*legal grounds*).
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer (*primary claim*), yang merupakan tuntutan pokok; dan tuntutan subsider (*subsidiary claim*), yang merupakan tuntutan pengganti bila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.

Dalam *identity of the parties* atau ciri-ciri penggugat dan tergugat sedangkan dalam *fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan

---

<sup>23</sup>Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta:Pradnya Paramita, 1993), h 98.

penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.

Dalam surat gugatan, dasar gugatan harus jelas dan tegas serta mendukung tuntutan (*petitum*) penggugat, agar petitum itu mendapatkan jawabannya didalam dictum atau amar putusan. Setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum harus diuraikan secara kronologis dan sistematis, sehingga setiap kalimat tuntutan diharapkan dapat diterima oleh pengadilan, agar hakim mudah memahami isi petitum, yang bertujuan untuk memudahkan hakim menilai apakah dasar gugatan merupakan sebab yang menjadi alasan penggugat minta dikabulkan isi tuntutannya. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Jadi, Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang “tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.

Dalam Ilmu Hukum Acara Perdata dikenal dua macam teori tentang penyusunan surat gugatan, yaitu<sup>24</sup>:

1. *Substantie rings theorie*, yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan atau diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan.
2. *Individualise rings theorie*, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya

---

<sup>24</sup> Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta :Bina Cipta,2000), h 99.

hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu disebutkan sekaligus dalam surat gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan dalam sidang disertai pembuktiannya.

Dalam cara mengajukan yang tidak kalah pentingnya, yang harus diperhatikan adalah kemana gugatan diajukan. Secara garis besar, pasal 118 HIR/142 RBg mengatur hal tersebut yang mengatakan<sup>25</sup>:

1. Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama, masuk wewenang pengadilan negeri.
2. Jika tidak diketahui tempat tinggal penggugat, gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat.
3. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, dipilih oleh penggugat.
4. Apabila pihak tergugat ada dua orang, yaitu yang seorang misalnya adalah yang berhutang dan yang lain penjaminnya, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri pihak yang berhutang.
5. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat.
6. Atau kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, dapat juga diajukan kepada pengadilan negeri di mana barang tetap itu terletak.

---

<sup>25</sup> Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* , h 110.

Perkara perdata secara sederhana memang hanya melibatkan dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat dalam suatu sengketa yang diajukan ke muka sidang pengadilan. Namun demikian, dalam kenyataan sering terjadi, dalam suatu perkara terdiri lebih dari satu orang penggugat melawan beberapa orang tergugat. Dan dapat juga penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Gabungan dari beberapa tuntutan dalam satu surat gugatan itulah yang sering dikatakan dengan komulasi gugatan. Hal ini diperbolehkan untuk mempermudah proses beracara dan menghindari kemungkinan dibuat putusan-putusan kontradiktif satu sama lain, dan bermanfaat dari segi prosedural serta tidak bertentangan dari prinsip cepat dan murah. Secara teoritis dikenal dua macam komulasi gugatan, yaitu<sup>26</sup>:

1. Komulasi obyektif, penggabungan beberapa objek atau tuntutan ke dalam satu surat gugatan perkara sekaligus. Dengan kata lain, tuntutan beraneka macam tetapi perkaranya tunggal.
2. Komulasi subyektif, penggabungan dua atau lebih subyek hukum dalam satu surat gugatan.

Undang-Undang tidak melarang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat, sesuai dengan pasal 4, 81, 107 Rv, 127 HIR, 151 RBg, 1283, 1284 BW, 18 WvK. Terhadap komulasi subyektif ini tergugat dapat mengajukan keberatannya kepada hakim, demikian pula sebaliknya tergugat

---

<sup>26</sup> Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, h 130.



diberikan hak untuk meminta dilakukan komulasi subyektif, yaitu mengikut sertakan tergugat-tergugat lain dalam satu gugatan yang sama.

Tangkisan tergugat ini yang menyatakan bahwa masih ada orang lain yang diikut sertakan dalam sengketa sebagai pihak yang berkepentingan disebut dengan exception plurium litis consortium. Seyogyanya tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap banyak tergugat harus ada hubungan atau koneksitas satu sama lain.

## 2. Pengertian Ganti Rugi

### a. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah berupa penggantian kerugian yang diderita oleh seseorang yang disebabkan oleh sikap atau tindakan orang lain. Tuntutan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dijelaskan bahwa :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*<sup>27</sup>.

R. Subekti merumuskan bahwa :

*"Ganti rugi adalah penggantian kerugian yang diderita seorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum diwajibkan mengganti kerugian yang karena kesalahan si korban"*<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup>RSoesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Rhedbook Publisiter, 2008), h. 306.

<sup>28</sup>R.Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Vitex, 2009), h. 49.

Mengenai ganti kerugian ini merupakan suatu asas pokok yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012, yang ditentukan sebagai berikut:

1. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang

Dari ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tersebut maka dapat dipakai ganti kerugian hanya diajukan jika ada perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menjelaskan pengertian perbuatan melanggar hukum karena sangatlah penting bagi lalu lintas hukum, khususnya mengenai ganti rugi tersebut.

### 3. Perbuatan Melanggar Hukum Dan Unsur-Unsurnya

Istilah melanggar hukum, pada umumnya adalah sangat luas. Perbuatan melanggar hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechtmatige daad*. Dari istilah di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa *onrechtmatige* adalah melanggar norma hukum, sedangkan istilah *daad* adalah perbuatan atau tindakan.

Achmad Ichsan bahwa :

*"Dengan adanya pengertian mengenai perbuatan tersebut, terdapat penulis yang menterjemahkan pengertian daad itu tidak sebagai perbuatan, melainkan sebagai tindakan, karena dianggap menyimpulkan baik perbuatan yang aktif maupun yang pasif."<sup>29</sup>*

Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan pengertian perbuatan melanggar hukum sebagai berikut:

*"Perbuatan melanggar hukum itu adalah mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dan masyarakat, dan kegoncangan itu tidak hanya terdapat peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar langsung, melainkan apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat".<sup>30</sup>*

Jadi setiap perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap pihak yang lain dianggap tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam kaitan dengan uraian diatas, maka Mahrus Ali memberi rumusan perbuatan melanggar hukum sebagai berikut:

*"Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda".<sup>31</sup>*

---

<sup>29</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dan Norma Hukum* (Bandung: Griya Indah, 1986), h.161..

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro *Tindakan-Tindakan Pidana Di Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), h.6.

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 12.

Selain rumusan yang dikemukakan ahli hukum di atas, lebih lanjut Eiise T. Sulistini dan Budi T. Erwin mengatakan sebagai berikut:

*Perumusan yang diberikan oleh undang-undang mengenai perbuatan melanggar hukum ini, ada?sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat (KUHP), yakni tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".<sup>32</sup>*

Jika diperhatikan rumusan perbuatan melanggar hukum yang dikemukakan Elise T. Sutistiani tersebut di atas, seakan-akan mewajibkan setiap orang harus bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan yang disengaja, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaian seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai berikut:

*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya".<sup>33</sup>*

---

<sup>32</sup>Eiise T Sulistina dan Budi T Erwin, *Pembelajaran Hukum Perdata* (Semarang: Graha Mada, 2009 ), h.37.

<sup>33</sup>R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Rhedbook Publisiter, 2008 ), h. 286.

Apabila ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka terlihat secara jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang sifatnya atau mengandung unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah merupakan suatu kesenjangan yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita orang lain, sedang dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), kerugian yang diderita orang lain adalah merupakan suatu akibat yang semata-mata disebabkan karena wanprestasi atau lalainya debitur.

Dalam Pasal 1371 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatakan bahwa penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Hal ini berarti bahwa tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1374 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang bersumber dari penghinaan dengan tujuan mendapatkan penggantian kerugian dan pemulihan kehormatan serta nama baik seseorang, harus realistis dan tidak mengada-ngada tetapi harus diperhatikan kedudukan dan kemampuan pelaku.

Perbuatan melanggar hukum sesungguhnya merupakan suatu alasan hukum dalam hal penggantian ganti rugi atas pencemaran nama baik seseorang, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, atau menyangkut perbuatan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHP), yang mengandung 4 (empat) hal yang harus dipenuhi yaitu<sup>34</sup>:

- 1) Adanya suatu pelanggaran hukum/ tindakan melawan hukum.

Pembuat undang-undang telah meletakkan sistem yang lain dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah meletakkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memberi ganti terhadap kerugian yang telah ditimbulkan.

- 2) Adanya kesalahan.

Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa sipelaku perbuatan melanggar hukum hanyalah bertanggung jawab atas adanya kerugian yang ditimbulkan, bila mana perbuatan itu dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Sebaliknya kesalahan yang bukan disengaja dan juga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, seperti yang diartikan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang dapat dituntut ganti rugi sepantasnya oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hubungan ini, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa:

---

<sup>34</sup> [www.blogardian.com/perbuatan-melanggar-hukum](http://www.blogardian.com/perbuatan-melanggar-hukum),.co.id

*"Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak memperbedakan kesengajaan dari hal kurang hati-hati, melainkan hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan dipihak pembuat perbuatan melanggar hukum agar sipembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian".<sup>35</sup>*

3) Adanya kerugian.

Penentuan kerugian-kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tetapi hal berbeda. Dalam undang-undang tidak diatur secara tegas tentang besarnya ganti rugi yang harus dibayar karena perbuatan melanggar hukum, sedang dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memuat ganti kerugian karena wanprestasi.

4) Hubungan kausalitas.

Sudah dengan sendirinya tidak dapat dituntut penggantian kerugian yang diderita tidak ada hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum. persoalan kausalitas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar penyebab terjadinya kerugian sehingga tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan hukum yang timbul.

**d. Kriteria Menentukan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Tuntutan Ganti**

---

<sup>35</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindaka-Tindakan Pidana Di Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), h. 65.

## Rugi

Sebelum dikemukakan beberapa alasan bagi seseorang untuk mengajukan tuntutan Ganti Kerugian sebagai akibat pencemaran nama baik, ada baiknya dikemukakan beberapa kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemohan/pencemaran nama baik, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) antara lain :

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natural atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- 2) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 3) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 4) Meniadakan keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

### A. Pengertian Pencemaran Nama Baik

#### 1. Pengertian Nama Baik

Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain. Nama merupakan salah satu anugrah dari tuhan karena dengan adanya nama seseorang akan dapat membedakan seseorang dengan orang lain. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Dimana setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Dengan tetap mematuhi norma-norma yang ada di dalam masyarakat disekitarnya<sup>36</sup>.

#### 2. Pengertian Pencemaran Nama Baik

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h 58.



Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Pencemaran nama baik adalah menyerang nama baik/reputasi seseorang dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar yang secara lisan atau tertulis. Reputasi dalam hal ini adalah harga diri yang secara umum dimiliki oleh individu yang berada dalam komunitas tertentu<sup>37</sup>.

### 3. Jenis Pencemaran Nama Baik

Menurut R. Soesilo, penghinaan/pencemaran nama baik ada 6 macam yaitu<sup>38</sup>:

1). *Menista secara lisan (smaad)* adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum.

---

<sup>37</sup>Muliadi <http://www.article19.org/data/files/medialibrary/1802/12-04-26-REPORT-defamation-IN.pdf>

<sup>38</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya (KUHP)*(Bogor: Politeia 1990), h 75.

2). *Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift)* adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum dengan cara tulisan baik melalui surat maupun media tulis lainnya.

3). Memfitnah (*laster*) adalah kejahatan menista seseorang.

4). Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) adalah penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan.

5). Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) adalah memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung,

6). Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) adalah melakukan suatu perbuatan menyebabkan sangkaan palsu pada seseorang seolah-olah orang tersebut melakukan tindak pidana.

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (dalam hukum pidana dikenal dengan istilah delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai

negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah dimana untuk hal ini pada dasarnya tidak diperlukan atau dibutuhkan aduan dari korbannya.

Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain.

#### 4. Bentuk kerugian Pencemaran Nama Baik

Ada pun bentuk kerugian yang merupakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa<sup>39</sup> :

##### a. Kerugian materiil.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

##### b. Kerugian immaterial/ idiil.

---

<sup>39</sup> Martokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: liberty, 1988),h 75

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/ idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara analogis. Mengenai hal ini mempergunakan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) di samping itu, pemulihan kembali ke keadaan semula.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian materiil juga mengandung kerugian immateriil, yang dinilai dengan uang.

## 5. Bentuk Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik

Adapun yang bentuk ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum menurut Abdulkadir, Prof. Muhammad sebagai berikut<sup>40</sup>:

1. dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa)
2. memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa)
3. larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa)
4. dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.
5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.



---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h 76

### C. Kerangka Konseptual



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis *field research kualitatif*, sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar dalam hal ini Kantor Pengadilan Negeri Makassar

Dipilihnya lokasi tersebut atas pertimbangan, bahwa Makassar adalah pusat Kota di Sulawesi Selatan, oleh karena cakupan interaksi sosial dan hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya sehingga sangat memungkinkan terjadinya pencemaran nama baik.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociologys Legal Research*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.

#### C. Sumber Data

Jenis data dalam rangkaian penelitian ini, adalah :

##### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara para Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dapat memberikan data dan informasi apakah putusan terhadap gugatan pencemaran nama baik sudah berjalan atau tidak yang ada relevansinya dengan objek kajian penulis.

## **2. Data Sekunder.**

Data yang diperoleh dengan menganalisa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek kajian, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan inti permasalahan kajian ini.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu :

### **1. Penelitian Pustaka.**

Teknik dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penulisan seperti buku /literature dan peraturan perundang-undangan atau referensi lain yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti.

### **2. Penelitian Lapangan.**

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan observasi langsung di lapangan dan mengadakan interview hakim yakni Pengadilan Negeri Makassar untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dikaji.

## **E. Instrumen Penelitian**



Dalam melengkapi data penelitian yang akan digunakan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat apa-apa yang telah disampaikan oleh hakim sebagai pihak yang terkait mengenai judul yang penulis angkat dalam skripsi ini.

## **F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

### **1. Pengelolaan Data**

Pengelolaan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode penelitian data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
- b. Reduksi kata adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dalam penelitian.
- c. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dalam pokok pangkalan pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada data tersebut.
- d. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan didiskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

### **2. Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan mengulaikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber data tetap dapat ditelusuri.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Atas Pencemaran Nama Baik Akibat Melanggar Hukum

Pada bagian ini akan dikemukakan masalah tata cara atau proses penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan orang lain. Dalam hukum acara perdata dikenal dua cara penyelesaian sebagaimana yang dikemukakan oleh I Cede Suwarsana :

*“Dalam Praktek, peradilan di Indonesia sebagai tempat penyelesaian perkara perdata maupun perkara pidana, maka dalam hal usaha penyelesaian perkara perdata pihak Pengadilan mengusahakan agar pihak berdamai saja(non litigasi), namun jika usaha tersebut tidak berhasil maka hakim selanjutnya menjadikan perselisihan itu sebagai hal yang harus diselesaikan menurut undang-undang(litigasi)”.*<sup>41</sup>

Adapun mengenai penyelesaian sengketa secara non litigasi dan litigasi adalah sebagai berikut <sup>42</sup> :

##### 1. Non Litigasi

---

<sup>41</sup>I Cede Suwarsana,SH, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Sul-Sel, wawancara oleh penyusun di Makassar, 19 juli 2014

<sup>42</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h 29.

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul, Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat, Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu<sup>43</sup>:

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Arbitrase

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.

Adapun mengenai bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pada jalur non litigasi sebagai berikut:

- a. Negosiasi**

---

<sup>43</sup> Milovanovic dalam Adi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia* (Surakarta: cetakan 1 LPP UNS dan UNS Press, 2007), h 10.

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya:

1. Memahami tujuan yang ingin dicapai
2. Menguasai materi negosiasi
3. Mengetahui tujuan negosiasi
4. Menguasai keterampilan teknis negosiasi, didalamnya

menyangkut keterampilan komunikasi.

#### **b. Mediasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral

sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun di mana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator professional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.

c. Arbitrasi

Arbitrase adalah yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah "klausula arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase.

## 2. Litigasi

Litigasi adalah proses di mana seorang individu atau badan membawa sengketa atau kasus ke pengadilan. Mengenai prosedur dan syarat pengajuan gugatan, dapat kita temukan didalam ketentuan HIR dan Rbg. HIR adalah singkatan dari *Herziene Inlandsch Reglement*, merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku dinegara kita hingga kini dan RBg adalah singkatan dari *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Reglement untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura<sup>44</sup>.

Sehubungan dengan masalah atau proses penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik akibat perbuatan melanggar hukum di atas, yang dapat dijadikan tolak ukur dan juga dijadikan bahan perbandingan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi perkara perdata akibat pencemaran kehormatan atau pencemaran nama baik.

Adapun jalur yang lebih baik digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah jalur non litigasi hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia selalu mengutamakan asas kekeluargaan, selain itu proses penyelesaian yang singkat sehingga tidak memerlukan pengorbanan yang banyak dan dapat memperbaiki

---

<sup>44</sup> Riduan Syahrani,, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, Cet. V), hal 13-19

kembali hubungan kedua belah pihak yang berperkara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh I Cade Suwarsana :

*“Penyelesaian tuntutan ganti rugi dengan dasar perbuatan melanggar hukum dalam hal mencemarkan nama baik seseorang biasanya diselesaikan di luar pengadilan mengandung makna tersendiri, jika dibandingkan dengan proses penyelesaian melalui pengadilan. sebab usaha damai diluar Pengadilan lebih banyak diliputi rasa kekeluargaan, seperti permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan dan begitu pula sebaliknya menerima/menyambut permintaan maaf itu kepada orang yang merugikannya atau yang mencemarkan nama baiknya tersebut”<sup>45</sup>.*

## Analisis Kasus

1. Nomor : 101 /Pdt.G /2008 / PN. Mksr

### a. Putusan Pidana

Berdasarkan putusan pidana dengan nomor register : 1332 / Pid.B / 2007/ PN.Mks tertanggal 27 desember 2007, yang menyatakan siti hawa (terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan” dan diberikan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)

Adapun penghinaan yang dialami oleh korban yaitu Fadhliyah Nur Thairah terhadap tuduhan yang dilakukan terdakwa adalah saudara korban melakukan sesuatu yang tidak sesuai norma agama yaitu dengan memelihara mahluk halus berupa tuyul. Sehingga dijatuhkanlah hukuman

---

<sup>45</sup>I Cade Suwarsana,SH, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Sul-Sel, wawancara oleh penyusun di Makassar, 19 juli 2014



dimana terdakwa melanggar tindak pidana penghinaan yaitu pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan putusan tersebut terdakwa tidak mengajukan upaya hukum berupa banding sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum atau dengan kata lain *in kracht van gewijsde*.

#### b. Sinopsi Kasus

Pada Tanggal 18 April 2007 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di jalan Perumahan Bumi Palem Blok R Kota Makassar. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban tersebut menjemur pakaian di halaman rumahnya sambil bernyanyi. Kemudian muncul terdakwa Pr. SITTI HAWA alias Ny. DWI PRIYONO dari pintu rumahnya dan langsung menunjuk saksi korban sambil berteriak “ Mak lampir Kamu, kamu sekarang lagi boke. Boke karena kamu sudah kasih keluar tuyul mu “ dan tidak lama kemudian datang suami korban Ik. ROCHNAD DZULFIKAR mengendarai sepeda motor bersama anaknya. Saksi korban menanyakan kepada suaminya “apa artinya boke, akan tetapi suami saksi korban diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian datang Pr. ECCE yang merupakan adik Terdakwa sambil berteriak :” keluar kamu” mendengar suara teriakan tersebut saksi korban keluar dari rumahnya, dan dari sebelah rumah saksi korban, Terdakwa Pr. SITTI HAWA berteriak “ kamu boke karena kasih keluar

tuyul mu. Korban kemudian mendatangi Pr. SITTI HAWA di depan rumahnya, namun belum sempat korban bicara Pr. SITTI HAWA berkata memang kamu biangnya, kamu itu pelihara tuyul dan dijawab oleh saksi korban” Hati-hati kalau bicara nanti saya lapor polisi. Lalu suami saksi korban Lk. . ROCHNAD DZULFIKAR bertanya kepada Pr. SITTI HAWA “ apa benar istri saya pelihara tuyul, dan suami saksi korban menjawab: “ terimah kasih “ sambil menarik saksi korban pulang ke rumahnya. Atas ucapan terdakwa Pr. SITTI HAWA sehingga saksi pelapor Pr. FADHLYAH merasa kehormatan dan nama baiknya telah dicemarkan oleh terdakwa karena disampaikan di depan orang banyak, yang mana maksud terdakwa melakukan hal itu agar supaya diketahui umum.

Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum maka saudara korban berharap si terdakwa sudah taubat. Akan tetapi sebaliknya saudara terdakwa tambah melancarkan serangan pencemaran nama baik/penghinaan sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian.

#### c. Gugatan Perdata

Adapun yang menjadi penggugat yaitu Fadhliyah Nur Thairah, di mana yang menjadi tergugat adalah Sitti Hawa. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh saudara penggugat yang didaftarkan oleh kuasa hukumnya di pengadilan negeri Makassar pada tanggal 29 April 2008, di mana dalam dalil gugatan tersebut setelah adanya putusan dari majelis hakim yang menyatakan bahwa saudara tergugat telah terbukti secara sah dan

menyakinkan telah terbukti melakukan tindakan pencemaran sebagaimana diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana 4 bulan. Penggugat berharap bahwa tergugat tidak lagi melancarkan pencemaran nama baik dan menyesali perbuatan tersebut tetapi sebaliknya tergugat tambah gencar melakukan penghinaan sehingga mengancam ketenteraman keluarga penggugat dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan perdata berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1365 yang berbunyi *“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Lehih lanjut diatur dalam pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi *“ tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggati kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik “* maka penggugat melakukan tuntutan terhadap tergugat dengan mengganti kerugian baik secara materiil maupun immateril yang dialami oleh saudara penggugat sebesar 506.819.000.-dan membebankan biaya perkara kepada tergugat.

#### d. Jawaban Tergugat

Bahwa tergugat menolak sepenuhnya gugatan yang diajukan oleh saudara penggugat di mana berdasarkan isi gugatan yang diajukan

penggugat yang berlandaskan pada pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) telah daluwarsa. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 april 2007 sedang penggugat mengajukan gugatannya terjadi pada tanggal 28 april 2008. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 1380 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi *“tuntutan dalam hal penghinaan gugur dengan lewat 1(satu) tahun terhitung mulai dari berlakunya perbuatan dan diketahui perbuatan itu oleh penggugat”*

Berdasarkan gugatan penggugat yang mengenai kerugian 506.819.000.- di mana saudara penggugat mengalami kerugian tersebut baik secara materiil maupun immateriil tidak dapat dibuktikan kebenaran kerugian tersebut dan tidak dapat dibenarkan karena tidak melalui pertimbangan majelis hakim. Menurut tergugat itu hanyalah karangan kerugian yang dibuat oleh penggugat.

#### e. Putusan Majelis Hakim

##### 1. Putusan Pengadilan Negeri

Mengenai putusan hakim dalam perkara ini yaitu menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat, dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan kejadian setelah tergugat mendapatkan saksi pidana penjara oleh majelis hakim bahwa tergugat melakukan pencemaran nama baik dan meneror keluarga penggugat sehingga penggugat mengalami kerugian.

##### 2. Tanggapan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Dalam memberikan putusan terhadap perkara perdata tersebut hakim menggunakan metode penemuan hukum dalam bentuk penafsiran sistematis. Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya.<sup>46</sup>

Hal tersebut tersurat dalam putusan yang dikeluarkan dalam perkara nomor : 101 / Pdt.G / 2008 / PN Mks mengenai gugatan pencemaran nama baik :

- bahwa melihat isi dari ketentuan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) “tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewat waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya itu oleh Penggugat” maka disini tidak disyaratkan bahwa perkara penghinaan tersebut harus terlebih dahulu diputus / diselesaikan melalui perkara pidana.
- bahwa suatu perkara penghinaan merupakan bagian dari hukum pidana, sehingga melalui proses persidangan hakim pidanalah yang dapat memutuskan suatu tindak pidana penghinaan.
- bahwa dengan demikian maka tuntutan ganti rugi atas perkara

---

<sup>46</sup>R.Soeroso,*Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press,2001), h 50.

penghinaan hanyalah dapat diajukan secara perdata setelah terlebih dahulu ada putusan yang menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut

### 3. Putusan Pengadilan Tinggi

Mengenai putusan hakim dalam perkara ini yaitu menolak gugatan banding yang diajukan oleh penggugat, dan menguatkan dalil putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri.

### 4. Tanggapan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi

Dalam perkara tersebut majelis hakim menggunakan metode penemuan hukum dalam bentuk penafsiran sistematis di mana hakim dalam putusan tersebut menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Hal ini terlihat dari pertimbangannya :

- bahwa terhadap putusan aquo, pembanding semula penggugat melalui kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 juli 2009, ternyata tidak ada hal-hal baru perlu dipertimbangkan, dapat melemahkan putusan aquo.
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan

Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 november 2008  
No.101/pdt.G/2008/PN.Mks.sudah tepat dan benar.

- bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor 101/Pdt.G/2008/PN.Mks. tanggal 24 Novembaer 2008 sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan.

Terhadap putusan tersebut, tidak ada upaya hukum kasasi sehingga putusan tersebut *in kracht van gewerz*.

## 2. Nomor : 183 / Pdt.G / 2012 / PN Mks

### a. Kasus Posisi

- Bahwa pada awalnya antara Hj Nursia dan Abdul Hamid, adalah memiliki hubungan hukum dalam kaitan arisan, di mana Hj Nursia selaku pemegang arisan dan Abdul Hamid selaku peserta arisan, dan arisan mana berlangsung sejak tanggal 8 Desember 2001 hingga 10 Januari 2012, dengan keseluruhan peserta arisan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa arisan yang dijalankan oleh Hj Nursia tersebut disepakati secara bersama oleh keseluruhan peserta arisan untuk menyeter uang kewajiban sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta arisan setiap harinya. Penarikan/ pengundian setiap 10 (sepuluh) hari sehingga keseluruhan uang kewajiban setiap pengundian berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bagi peserta yang nomornya naik dalam pengundian akan mendapatkan dana sejumlah

Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Abdul Hamid selaku salah satu anggota peserta arisan yang mengambil 2 (dua) nomor telah mendapatkan giliran pengundian dan secara hukum pula telah dibayarkan oleh Penggugat untuk 2 (dua) nomor yang diambilnya tersebut berdasarkan kwitansi pembayaran-penerimaan hak Abdul Hamid dimaksud.
- Bahwa setelah pembayaran dan penerimaan hak Abdul Hamid tersebut dilakukan oleh Hj Nursia, di mana Abdul Hamid dengan secara melawan hukum dan secara sengaja telah melakukan tindakan dan ataupun perbuatan yang sifatnya fitnah dan mencemarkan nama baik Hj Nursia, Abdul Hamid secara sengaja melaporkan Penggugat ke Polsekta 10 sebanyak 3 (tiga) kali namun pihak Penyidik tidak melanjutkan proses/pengaduan laporan pidana dimaksud dengan alasan *error in persona* (kesalahan atas subyek untuk diadukan/ dilaporkan). Abdul Hamid merasa tidak puas, kemudian memasukkan kembali laporan/pengaduannya ke Polwiltabes Makassar, yang hingga kini proses penyidikannya tidak berjalan sebagaimana mestinya atau telah dipandang tidak berlanjut. Patut ditambahkan bahwa Hj Nursia dilakukan penahanan atas dirinya di saat penyidikan berlangsung di Polsekta 10 .
- dilanjutkan dengan cara membuat berita bohong dan fitnah dan ataupun pencemaran\nama baik Hj Nursia sebagaimana yang dimuat pada media massa/harian umum atau Koran "Fajar" pada halaman 19, kolom Aneka, yang terbit pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2012, dengan judul berita yakni : IKUT ARISAN, TERTIPU RP. 29 JUTA. Dengan adanya tulisan tersebut maka Hj Nursia merasa dirugikan dan



melakukan gugatan terhadap Abdul Hamid.

b. Gugatan Penggugat

- Tergugat I : H. Abdul Hamid, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 31 (Pemilik Toko Belawa), Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar.
- Tergugat II : PT. Media Fajar, berkedudukan di Jalan Racing Center,

Adapun yang menjadi dalil gugatan pengugat yaitu dengan adanya tulisan di Koran fajar sehingga membuat penggugat merasa tidak nyaman dan mengalami kerugian sehingga sepatutnyalah tergugat membayar kerugian tersebut sebesar Rp.196.733.333.- dan sita jaminan (CB)/*conservatoir beslag* yang dimohonkan dalam perkara ini adalah sah.

c. Jawaban Tergugat

Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat karena gugatan tersebut tidak jelas atau kabur.

Adapun yang menjadi alasan dari tergugat I adalah Bahwa Tergugat I tidak pernah, sekali lagi tidak pernah membuat berita bohong dan fitnah ataupun pencemaran nama baik Penggugat lewat wartawan atau Koran fajar. Tergugat I tidak pernah bertemu muka, tidak kenal dengan wartawan Fajar, tidak pernah diwawancarai sehingga dimuatnya berita

tersebut adalah tanggung jawab Koran Fajar sendiri. Adapun pengaduan Tergugat I pada polisi atas perbuatan Penggugat yang tidak mau membayar uang arisan Tergugat I adalah perbuatan yang dibenarkan. Oleh karena itu Tergugat I menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak Tergugat I akan uang arisan, bukan main tindakan hakim sendiri.

Sementara alasan dari tergugat II adalah Bahwa berdasarkan undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, berita yang dimuat dalam media massa cetak dipertanggung jawabkan oleh penanggung jawab. Hal tersebut diatur dalam pasal 12 UU No. 40/1999 tersebut di atas. Oleh karena itu tindakan Penggugat menggugat PT. Media Fajar dalam perkara aquo jelas tidak tepat, salah alamat dan salah subyek (*error in persona dan error in subyekto*). Gugatan tersebut mestinya ditujukan kepada penanggung jawab, bukan kepada PT. Media Fajar sebagai perusahaan pers yang menerbitkan Harian Fajar. Kewajiban PT. Media Fajar selaku badan usaha hanya yang berkaitan dengan aspek-aspek kepengusahaan seperti pajak perusahaan dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

d. Gugatan Rekonvensi

- Menyatakan perbuatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak mau membayar uang arisan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp.29.000.000,- adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I

Konvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah)
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar kerugian karena kehilangan keuntungan sebanyak 10% dari uang Rp. 29.000.000,- setiap bulan, perhitungan bulan Maret 2009 sampai ada putusan yang pasti dan tetap.

e. Jawaban Tergugat Rekonpensi

- Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi

f. Putusan Majelis Hakim

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Memerintahkan sita jaminan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita, tanggal 22 Desember 2012 No. 183/B.A.Pdt.G./2012/PN.Makassar, diangkat.
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini, yang diperhitungkan hingga saat ini berjumlah Rp. 859.000,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

g. Tanggapan Penulis

Dalam memberikan putusan terhadap perkara perdata tersebut hakim menggunakan metode penemuan hukum dalam bentuk penafsiran sistematis dan penafsiran autentik. Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya seperti dalam pasal 1372 dengan pasal 1380 . Sedangkan Metode Interpretasi secara Authentik (Resmi) yaitu penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat Undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam Undang-undang tersebut<sup>47</sup>, seperti pengertian penanggung jawab dalam undang-undang pers. Sebagaimana hal tersebut tertera didalam putusan perkara nomor : 183 / Pdt.G / 2012 / PN Mks.

- Menimbang, bahwa pertanggung jawaban hukum menurut UU Pers, Pasal 12 menyebutkan "yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan redaksi", dalam Pasal 12 disebutkan apabila terjadi sengketa hukum maka yang bertanggung jawab adalah "Penanggung Jawab", juga dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) disebutkan " dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

---

<sup>47</sup>R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta :Rajawali Press,2001), h 50.

- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa menurut Pasal 12 tersebut, bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap isi pemberitaan pers adalah Penanggung Jawab yang nama alamatnya termuat dalam satu kolom dan diumumkan dalam media yang bersangkutan.

Terhadap putusan tersebut, tidak ada upaya hukum banding sehingga putusan tersebut *in kracht van gewijs*.

#### B. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik.

Bahwa setelah penulis melakukan penelitian dengan cara mewawancarai salah seorang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang di mana menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik di mana dalam wawancara tersebut dia memaparkan bahwa terkadang dalam melakukan gugatan terhadap pencemaran nama baik setidaknya penggugat melampirkan putusan hakim pidana yang di mana pokok perkara tersebut tercantum putusan yang berkekuatan hukum tentang delik penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tergugat. Sebagai mana dalam pasal 1377 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) "*Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika orang yang dihina itu*

*dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya” .*

Proses penyelesaian sengketa terhadap gugatan pencemaran nama baik memakan waktu yang lama dikarenakan harus menunggu putusan terhadap tindak pidana penghinaan yang mempunyai kekuatan hukum. Karena dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum hakim dapat menentukan bahwa benar telah terjadi tindakan pencemaran nama baik.

Jumlah kerugian yang diajukan/diminta oleh penggugat juga terkadang tidak sesuai dengan limit yang diputuskan oleh hakim. Hal ini disebabkan karena limit yang diminta oleh penggugat terlalu banyak sehingga memberatkan tergugat untuk menggati kerugian.

Salah satu faktor yang menghambat proses terjadinya gugatan ganti rugi atas pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1380 yaitu telah lewatnya masa gugatan atau telah daluwarsanya suatu gugatan terhadap pencemaran nama baik di mana masa daluwarsa tersebut 1 (satu) tahun setelah adanya peristiwa pidana penghinaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan bertitik tolak dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka berikut ini dikemukakan:

1. Penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik atas perbuatan melanggar hukum, maka dapat ditempuh melalui dua cara yakni penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui proses Pengadilan (litigasi). Pada proses penyelesaian di luar pengadilan sangat bermanfaat dan mengurangi biaya dan waktu yang relative singkat. Sementara peroses di pengadilan terkadang memakan waktu yang relatif lama.
2. Faktor penghambat proses gugatan terhadap pencemaran nama baik yaitu tidak adanya putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penghinaan, dan terkadang limit yang diminta oleh penggugat memberatkan tergugat. Serta waktu pengajuan gugatan tersebut sudah daluwarsa.

## B. Saran

1. Perbuatan pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian baik itu kerugian materil maupun inmateril, sehingga sepatutnyalah seseorang mengajukan gugatan terhadap perbuatan melanggar hukum tersebut. Akan tetapi sebaiknya proses tersebut dilakukan dengan cara *non litigasi* (penyelesaian diluar pengadilan) dikarenakan proses tersebut relatif cepat dan prosesnya pun sesuai dengan asas kekeluargaan sehingga memungkinkan kedua belah pihak berbaikan.
2. Dalam mengajukan gugatan atas pencemaran nama baik maka penggugat harus memperhatikan putusan pidana atas perbuatan penghinaan/pencemara nama baik yang berkekuatan hukum, agar proses pengajuan gugatan berjalan dengan baik dan tidak memakan waktu yang relatif lama. Serta penggugat mesti memperhatikan masa berlakunya atau daluwarsa gugatan yang dimana masa daluarsanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.



## DAFTAR PUSTAKA

Aji, Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : sinar grafik, 2011.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2005

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : sinar grafik, 2007.

Anwar ,H.A.K. Moh. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 1*. Bandung : Citra

Aditya Bakti, 1994.

Ardian. *Perbuatan Melanggar Hukum*. [www.Blog.co.id](http://www.Blog.co.id).

Dailystudi. Kejahatan atas kehormatan dalam lapangan nama baik, <http://Mydailystudi.wordpress.com/2011/07/02>.

Djojodirdjo, Moegani. *Pelajaran Hukum Perdata 9.Hak-hak asai manusia dan media (human right and the media)*. Jakarta: Yayasan obor indonesia, 2009.

Ichsan ,Achmad. *Hukum Dan Norma Hukum*, Bandung: Griya Indah, 1986.

Jusri. [http:// www.NegaraHukum.com/hukum/delik Penghinaan Html](http://www.NegaraHukum.com/hukum/delik/Penghinaan.Html).Noember 19 2010.

Marpaung ,Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,Pengertian Dan Penerapannya*. Jakarta: PT Grafindo Persada 1997.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1977

Milovanovic. *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, cetakan 1  
LPP UNS dan UNS Press, Surakarta 2007.

Mudzakir. *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*,  
Semarang: PT Karya Bangsa, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra  
Aditya Bakti, 2000.

Muliadi, [http:// wwwarticle.org/date/file/media libery/1802/12-04-26-report-  
defamation in.pdf](http://www.article.org/date/file/media_libery/1802/12-04-26-report-defamation_in.pdf).

Munajat , Mahkrus. *Dekonstruksi Pidana Islam*. Jogjakarta: logung, Pustaka 2004.

Nasution ,Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2007.

Negara, KUHP & KUHP, Gama pers 2010

Podjohaidjojo ,Matiman. *Gugatan Ganti rugi*, Jakarta : PT grafindo, 2007.

Prodjodoikoro, iyono. *Delik Penghinaan*. Bandung: PT Adijaya, 2008

Prodjodikoro ,Wirjono. *Tindaka-Tindakan Pidana Di Indonesia*. Bandung : PT  
refika aditama, 2006.

Soekanto,Soerjono. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia  
Indonesia, 2001.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PradnyaParamita,  
1993.

Soesilo ,R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya pasal demi pasal*. Bogor : politeia, 1990.

Soesilo R, *KITAB Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Rhedbook  
Publisiter 2008.

Soesilo R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Press,2001.

Subekti,R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Vitex, 2009.

Sumarsono. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Akademika Persido, 2001

Sutantio ,Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum acara perdata dalam hukum dan praktek*. Jakarta :Bina Cipta,2000.

Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra  
Aditya Bakti,2009.

Tulistina eiis T dan Budi t erin. *Pembelajara Hukum Perdata*. Semarang: Graha  
Mada, 2009